

ABSTRAK

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan yang memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada didalamnya. Menurut para ahli ekonomi dan perencanaan regional terdapat dua hal terpenting dalam pembangunan, yaitu menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Sirojuzilam, 2005). Seiring dengan berjalannya waktu ditemui polemik antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan berimbang. Pada awalnya, diduga pemerataan akan tercapai jika ada pertumbuhan, namun kenyataannya tidak. Pertumbuhan suatu wilayah tidak serta merta dapat menimbulkan pertumbuhan yang sama didaerah lainnya. Pertumbuhan wilayah yang berbeda-beda inilah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin tajam.

Ketimpangan wilayah dapat terjadi dalam skala nasional maupun lokal. Ketimpangan wilayah menjadi menarik untuk dibahas karena ketimpangan wilayah merupakan salah satu dampak dari awal pembangunan itu sendiri dan apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak buruk bagi wilayah-wilayah yang tertinggal. Penelitian mengenai ketimpangan wilayah ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 26 kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda baik dalam segi ekonomi, demografi serta sumberdaya alam yang berbeda-beda. Pendapatan perkapita yang cukup tinggi tidak terjadi di seluruh wilayah di Jawa Barat. Selain itu, jumlah penduduk tidak merata diseluruh wilayah Jawa Barat, masih ada beberapa wilayah yang mendominasi wilayah lainnya. Angka PDRB yang tinggi hanya

didominasi oleh beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat, sedangkan kota/kabupaten lainnya hanya dapat menghasilkan sedikit pendapatan bahkan tidak sampai 50% dari pendapatan wilayah lainnya seperti Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Pendapatan yang berbeda ini membuat pembangunan dimasing-masing daerah pun menjadi berbeda.

Ketimpangan wilayah tidak hanya bisa dilihat dari segi ekonomi, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek lainnya seperti aspek spasial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 16 variabel dengan 66 indikator yang berasal dari aspek sosial, ekonomi serta fisik. Variabel-variabel tersebut menjadi input untuk menilai ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan alat analisis yang digunakan untuk menilai ketimpangan wilayah yaitu, Indeks Williamson dan *interregional comparison: standardized variable*. Setelah dianalisis menggunakan Indeks Williamson, didapatkan bahwa ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat berada pada level ketimpangan tinggi dengan angka 0,6 pada tahun 2013. Selain itu, kondisi ketimpangan wilayah dilihat berdasarkan 9 kelompok indikator yaitu kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, kelompok jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan dan kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan, kelompok ketenagakerjaan, kelompok produktifitas ekonomi, kelompok performa ekonomi dan investasi, kelompok tataguna lahan dan panjang jalan aspal, kelompok kondisi jalan dan suhu, serta kelompok curah hujan. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kemudian dibentuk tipologi wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi kedalam 7 tipe, yaitu: tipe low-1, tipe low-2, tipe low-3, tipe medium-1, tipe medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2. Dari hasil analisis sebelumnya didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat, antara lain: perbedaan kualitas sumberdaya manusia, perbedaan angka pengangguran, perbedaan taraf/ tingkat kesehatan masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan serta kesehatan, perbedaan kualitas infrastruktur, perbedaan jumlah investasi, perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta strategi yang ditujukan langsung terhadap masing-masing wilayah sesuai dengan karakteristik dan masalah yang dialaminya.

Kata kunci: Ketimpangan wilayah, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah, Strategi untuk mengatasi ketimpangan wilayah